

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENDUKUNG PROSES PERCEPATAN
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH SECARA MASSAL TANJUNGBALAI ASAHAH**

ABSTRAK

Augus Salim

203311030009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dengan menjalankan pemeriksaan tambahan berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Perkara yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran prinsip keadilan dalam upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU yang terjadi di Pengadilan Negeri. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif dan perbandingan hukum. Metode yurisis normatif digunakan untuk menganalisis data-data yang menunjuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip keadilan dalam upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Dalam pelaksanaan pembebanan pembuktian dilakukan secara tidak merata / tidak seimbang, dimana pemohon tidak dapat memberikan bukti-bukti baru sedangkan KPPU dapat memperkuat dan memperjelas pembuktian melalui pemeriksaan tambahan yang diperintahkan oleh hakim andaikan hakim merasa kurang jelas. Akibatnya pemohon keberatan tidak dapat memperkuat pembelaannya karena tidak dapat menambah bukti baru yang dapat meringankan pemohon.